



Visi Indonesia Emas 2045



Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia.

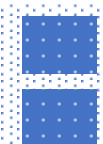


NKRI Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan





5 Sasaran Utama Visi Indonesia 2045



01 Pendapatan per kapita setara negara maju

	2025 Baseline	2045 (Target)
GNI Per Capita (USD)	5.500– 5.520	30.300
Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15,0
Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0

Sumber: World Bank (2022); BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

03 Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat

	2025 Baseline	2045 (Target)
Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar

Sumber: Pareto economics (2023); diolah oleh Bappenas (2023)

02 Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang

	2025 Baseline	2045 (Target)
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	0,5-0,8
Rasio Gini (indeks)	0,379-0,382	0,290 – 0,320
Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5

Sumber: BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

04 Daya saing sumber daya manusia meningkat

	2025 Baseline	2045 (Target)
Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0,73

Sumber: World Bank (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

05 Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

	2025 Baseline	2045 (Target)
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5

Sumber: KLHS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)



17 Arah Pembangunan Nasional

TRANSFORMASI INDONESIA

Misi 1. Transformasi Sosial

- IE1 Kesehatan untuk Semua
- IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata
- IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Misi 2. Transformasi Ekonomi

- IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
- IE5 Penerapan Ekonomi Hijau
- IE6 Transformasi Digital
- IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Misi 3. Transformasi Tata Kelola

- IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

LANDASAN TRANSFORMASI

Misi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
- IE11 Stabilitas Ekonomi Makro
- IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
- IE14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
- IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas
- IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
- IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi 8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan



20 Upaya Transformatif Pembangunan

Transformasi Ekonomi

6. Peningkatan **anggaran IPTEKIN** nasional menuju komersialisasi oleh Industri
7. **Industrialisasi**: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
8. **Percepatan transisi energi berkeadilan** menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
9. **Superplatform** untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital
10. **Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan** pertumbuhan ekonomi
11. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Transformasi Sosial

1. Percepatan **wajib belajar 13 tahun** (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2. Peningkatan **partisipasi pendidikan tinggi** dan **lulusan STEAM berkualitas** termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan
3. **Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan** seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
4. **Investasi pelayanan kesehatan primer**, penuntasan *stunting*, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
5. **Penuntasan kemiskinan** dengan satu sistem Regsosek dan **perlindungan sosial adaptif terintegrasi**.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

18. **Penguatan karakter dan jati diri bangsa**
19. **Reformasi pengelolaan sampah** terintegrasi dari hulu ke hilir
20. **Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan** dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*)



Transformasi Tata Kelola

12. **Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN** (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), **serta pemberantasan korupsi**.
13. **Penguatan integritas partai politik**

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

14. **Transformasi sistem penuntutan** menuju *single prosecution system* dan **transformasi lembaga kejaksaan** sebagai *advocaat generaal*
15. **Transformasi industri pertahanan** menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional
16. **Reformasi perencanaan dan fiskal**: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal
17. **Reformasi subsidi** terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran





KESELARASAN VISI RPJPN, RPJPD PROVINSI & RPJPD KOTA METRO

VISI RPJPN
2025-2045

NKRI BERDAULAT, MAJU,
BERKELANJUTAN

VISI RPJPD
PROVINSI
LAMPUNG
2025-2045

SEJAHTERA, MAJU,
MERATA, BERKELANJUTAN

VISI RPJPD KOTA METRO 2025-2045

**SEJAHTERA, BERBUDAYA, MAJU,
BERKELANJUTAN**

SEJAHTERA

Kesejahteraan holistik dan kehidupan yang bermakna, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga aspek-aspek sosial, lingkungan, dan kesejahteraan individu

MAJU

Visi "Kota Maju" merupakan gambaran masa depan yang ingin di capai Kota Metro, di mana terjadi kemajuan dan perkembangan yang signifikan di berbagai bidang.

BERBUDAYA

Memelihara dan menjunjung tinggi kebudayaan lokal, toleransi dalam Kebhinekaan Tunggal Ika serta siap menghadapi dan memaknai budaya dari luar

BERKELANJUTAN

Pembangunan dengan pendekatan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan.



MISI RPJPD KOTA METRO 2025-2045

Misi ke-1: Transformasi Sosial

Untuk membangun masyarakat Kota Metro yang sehat, cerdas, kreatif, dan berdaya saing

Misi ke-2: Transformasi Ekonomi

Untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

Misi ke-3: Transformasi Tata Kelola

Untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif

Misi Ke-4: Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui peningkatan keamanan, ketertiban umum dan penegakan supremasi sebagai kondisi perlu yang akan mendukung stabilitas makro ekonomi daerah serta mendorong kehidupan demokrasi bertanggungjawab dalam masyarakat

5

Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Ketahanan sosial mengacu pada kemampuan masyarakat untuk merespons, beradaptasi, dan pulih dari tekanan dan stres social.
- Ketahanan budaya mengacu pada kemampuan suatu masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikan warisan budaya, nilai-nilai, dan identitasnya
- Ketahanan ekologi berfokus pada kemampuan suatu sistem ekologi atau lingkungan untuk beradaptasi dan pulih dari perubahan atau tekanan lingkungan

6

Misi ke-6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Peningkatan akses penduduk di seluruh wilayah kota terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; Distribusi infrastruktur yang merata di berbagai wilayah, termasuk jaringan transportasi, air bersih, sanitasi, dan energi

7

Misi ke-7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan nyaman bagi masyarakat

8

Misi ke-8 : Kestinambungan Pembangunan

untuk menjamin konsistensi, keselarasan dan kesinambungan perencanaan pembangunan secara antarwaktu, antar periode dan antarjenjang pemerintahan; dan terbentuknya ekosistem pendanaan pembangunan daerah yang mencirikan kemandirian

17 Sasaran dan 8 Misi RPJPD Kota Metro 2025–2045

Transformasi Pembangunan Daerah

Misi 1. Transformasi Sosial

- 1 Kesehatan untuk semua
- 2 Pendidikan Berkualitas yang Merata
- 3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Misi 2. Transformasi Ekonomi

- 4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
- 5 Penerapan Ekonomi Hijau
- 6 Transformasi Digital
- 7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Misi 3. Transformasi Tata Kelola

- 8 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Landasan Transformasi

Misi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kempimpinan Indonesia

- 10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial
- 11 Stabilitas Ekonomi Makro
- 12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- 13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
- 14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
- 15 Lingkungan Hidup Berkualitas
- 16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
- 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kerangka Implementasi Transformasi

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Misi 7. Mewujudkan Sarpras Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi 8. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan

Tahapan Pembangunan yang Tertuang dalam RPJPD Kota Metro 2025–2045



Sasaran Pokok, Indikator dan Target Tahap 1 RPJPD 2025-2045

Misi 1

Transformasi Sosial

Sasaran Pokok/ Indikator			Baseline 2025	TARGET 2025-2029
IE.1.	Kesehatan untuk semua			
	1)	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,14	78,04
	2)	Kesehatan Ibu dan Anak:		
	a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	0	0
	b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	7,1	6,75
	3)	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (case detection rate) (%)	100	100
	4)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100
IE2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata			
	5)	Hasil pembelajaran		
	a.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,03	12,02
	b.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,79	15,1
	6)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	16,1	16,65
	7)	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja (%)	68,36	72,32
IE.3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif			
	8)	Tingkat Kemiskinan (%)	6	5
	9)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Metro (%)	95	98
	10)	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	29,9	31,85

SASARAN POKOK/ INDIKATOR			BASELINE 2025	TARGET 2025- 2029
IE.4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			
	11)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	15,73	15,67
	12)	Pengembangan Pariwisata		
	a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,77	3,19
	b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan Orang)	0,05	0,16
	13)	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		
	14)	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
	a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten/Kota (%)	0,003	1,733
	b.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)	0,11	0,96
	c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	11,98	12,38
	d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,35	2,69
	15)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4	3,6

Misi 2

Transformasi Ekonomi

SASARAN POKOK/ INDIKATOR				BASELINE 2025	TARGET 2025- 2029
	16)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		43,05	45,9
	17)	Tingkat penguasaan IPTEK			
		a.	Peringkat Index Inovasi Daerah (peringkat)	inovatif	inovatif
IE.5.	Penerapan Ekonomi Hijau				
	18)	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau (Provinsi)			
		a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	59,19	63,06
		b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,00	38,50
IE.6.	Transformasi Digital				
	19)	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi (Provinsi)		5,8	6,18
IE.7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
	20)	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi		1,15	1,07
	21)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		21,82	22,03
	22)	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)		-786,66	-739,995
IE.8.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				
	23)	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
		a.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	34	50,5

Misi 3

Transformasi Tata Kelola

Sasaran Pokok/Indikator			Baseline 2025	TARGET 2025-2029
IE.9.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif			
	24)	Indeks RB	69,58	73,935
	25)	Nilai SAKIP	68,98	73,235
	26)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,34	3,63
	27)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	85,25
	28)	Anti Korupsi		
	a.	Indeks integritas nasional (hasil survey penilaian integritas oleh KPK)	73,7	73

Misi 4

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

			BASLINE 2025	TARGET 2025-2029
IE.10.	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah			
	28)	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	100	100
IE.11.	29)	Persentase peningkatan ketertiban dan kenyamanan lingkungan masyarakat (%)	72	77
	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah			
	30)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,0000006	0,0000022
	32)	Tingkat Inflasi (%)	2,9 – 3,7	1,0 – 3,0
	33)	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a.	Rasio Kemampuan fiskal daerah		
IE.12.	Daya Saing Daerah			
	35)	Efektivitas Kerjasama Daerah (%) ^(Provinsi)	NA	80
	36)	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%) ^(Provinsi)	20	60
	37)	Indeks Kualitas Layanan Infra Struktur (%)	79,68	80,2775

SASARAN POKOK/ INDIKATOR				BASELINE 2025	TARGET 2025-2029
IE.13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
	37)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ^(Provinsi)		56,15 – 56,16	62,15-63,99
	38)	Persentase Kerukunan Umat Beragama		80	82,5
IE.14.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
	39)	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga			
	a.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga ^(Provinsi)		71,21	73,21-73,99
	b.	Indeks Perlindungan Anak		67,596	72,236
	40)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,29	0,25
IE.15.	Lingkungan Hidup Berkualitas				
	41)	Persentase Ruang terbuka Hijau/ RTH		17,13	20,35
	42)	Kualitas Lingkungan Hidup			
	a.	Indeks kualitas lingkungan hidup		62,5	62,925
	b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)		12	21,5
	c.	Timbulan Sampah Tertangani (%)		79	82
	d.	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA		26	44,4
IE.16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				
	43)	Ketahanan energi, air, dan pangan			
	a.	Ketahanan Energi			
	(i)	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*		28,75	241,6425
	b.	Ketahanan Pangan			
	(i)	Ketersediaan pangan utama/ beras (ton)		20.150	20.300

SASARAN POKOK/ INDIKATOR				BASELINE 2025	TARGET 2025-2029
		(ii)	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal perkapita)	2.396,78	5.027,19
		(iii)	Peningkatan cadangan pangan masyarakat (ton)	100	112,5
		c.	Ketahanan Air		
		(i)	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	110	112
		(ii)	Kebutuhan air minum rumah tangga perhari (m3)	1065,12	3899,295
IE.17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
	44)	Indeks Risiko Bencana (IRB)		107,06	100,5225
	45)	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) ^(Provinsi)			
		a.	Kumulatif	9,52	9,52
		b.	Tahunan	15,32	15,32

Tahap 1 (2025–2029) Penguatan Transformasi Pembangunan

Misi 1 Transformasi Sosial

1.1. Kesehatan Untuk Semua

- 1) Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal, penguatan sistem pemantauan kesehatan, penerapan inovasi teknologi kesehatan, dan penguatan infrastruktur kesehatan.
- 2) Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, penguatan sistem pemantauan dan pelaporan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, sosialisasi anti- stigma dan diskriminasi, serta penguatan sistem kesehatan.
- 3) Perencanaan dan peningkatan layanan Kesehatan yang inklusif dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.
- 4) Peningkatan Akses Informasi dan Edukasi, serta Jejaring dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi.
- 5) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
- 6) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
- 7) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
- 8) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
- 9) Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- 10) Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
- 11) Meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan layanan kesehatan dasar di seluruh wilayah dan Memperkuat fasilitas kesehatan, termasuk tenaga kesehatan dan infrastruktur medis.
- 12) Meluncurkan program edukasi kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan praktik kesehatan yang baik serta Mendorong penerapan pola hidup sehat di antara masyarakat.
- 13) Mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam keputusan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan Menyediakan akses penuh dan setara kepada layanan kesehatan reproduksi.
- 14) Mengintensifkan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular, seperti vaksinasi dan pengobatan yang efektif dan Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait praktik kebersihan dan pencegahan penyakit menular.
- 15) Meluncurkan kampanye untuk mengurangi faktor risiko PTM, seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan kurangnya aktivitas fisik serta Mendorong pola makan sehat dan gaya hidup yang mendukung kesehatan.
- 16) Meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pengembangan dan Membuat kebijakan untuk memastikan distribusi yang merata dan pemanfaatan optimal sumber daya manusia kesehatan.
- 17) Menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau dan Memberikan akses terhadap informasi dan alat kontrasepsi untuk keluarga berencana.
- 18) Meningkatkan keamanan pangan melalui pengawasan dan regulasi yang ketat dan Mendorong pertanian berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan pangan yang bergizi.
- 19) Melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan penyakit tropis yang umum di negara berkembang. Dan Memberikan dukungan untuk penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan.
- 20) Menyediakan layanan kesehatan mental yang terjangkau dan terintegrasi dan Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental.
- 21) Membangun sistem pemantauan kesehatan yang efektif untuk mengukur dan melacak indikator kesehatan dan Membuat kebijakan berdasarkan data kesehatan yang akurat dan terkini.
- 22) Mendorong penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan kesehatan jarak jauh dan Mengembangkan infrastruktur telemedicine untuk meningkatkan aksesibilitas terutama di daerah terpencil.



1.1. Kesehatan Untuk Semua

- 23) Membangun kemitraan antara sektor publik dan swasta, serta dengan organisasi internasional, untuk mendukung pembangunan kesehatan serta Mendorong kerja sama lintas sektor untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 24) Meningkatkan investasi dalam sektor kesehatan melalui alokasi anggaran yang memadai. Dan Membuat kebijakan yang mendukung perlindungan finansial bagi masyarakat dalam menghadapi biaya kesehatan.
- 25) Merumuskan strategi untuk mengatasi ketidaksetaraan kesehatan di antara berbagai kelompok masyarakat dan Memberikan fokus khusus pada kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap penyakit dan kesehatan yang buruk.
- 26) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dasar di semua wilayah Kota Metro
- 27) Melakukan program edukasi kesehatan kepada masyarakat terkait pola hidup sehat, perawatan prenatal, dan pencegahan penyakit
- 28) Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan, termasuk pemahaman pentingnya perawatan prenatal dan postnatal.
- 29) Peningkatan program pencegahan dan pengobatan TB dengan memperluas cakupan pemeriksaan dan pengobatan TB. Fokus pada pendeteksian dini, perawatan yang tepat, dan edukasi masyarakat tentang pencegahan TB
- 30) Mengintensifkan sosialisasi penyuluhan masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan.
- 31) Melibatkan komunitas dalam program edukasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai penyakit menular.
- 32) Meningkatkan kapasitas sistem pemantauan kesehatan untuk mendeteksi, melacak, dan merespons epidemi secara cepat.
- 33) Mendorong pelaporan aktif dan transparan dari fasilitas kesehatan dan penyedia layanan.
- 34) Meningkatkan ketersediaan layanan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan di pusat kesehatan.
- 35) Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan primer di tingkat komunitas.
- 36) Memperluas jaringan pusat kesehatan Masyarakat.
- 37) Melakukan sosialisasi edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat asuransi kesehatan.
- 38) Peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang keluarga berencana dan metode kontrasepsi modern. Sosialisasi informasi yang luas dan program pendidikan di sekolah-sekolah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pilihan kontrasepsi yang aman dan efektif. Untuk mendukung perlindungan sosial adaptif, bantuan sosial dapat diberikan kepada keluarga yang ingin menggunakan metode kontrasepsi modern
- 39) Memperluas aksesibilitas Masyarakat melalui pusat-pusat kesehatan reproduksi di seluruh wilayah Kota Metro.
- 40) Memperluas akses dan pengetahuan tentang metode kontrasepsi jangka panjang yang aman dan efektif. Program keluarga berencana harus
- 41) mengintegrasikan penawaran metode kontrasepsi jangka panjang sebagai opsi yang lebih mudah diakses.
- 42) Melaksanakan Sosialisasi edukasi intensif tentang kepentingan dan metode keluarga berencana.
- 43) Menyediakan akses mudah terhadap alat kontrasepsi dan pelayanan keluarga berencana.

1.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

- 1) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
- 2) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
- 3) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- 4) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
- 5) Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.
- 6) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
- 7) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
- 8) Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
- 9) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.
- 10) Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan guna menyediakan dana yang cukup untuk pengembangan infrastruktur, pelatihan guru, dan program-program peningkatan mutu pendidikan serta Memastikan penggunaan dana secara efisien dan efektif untuk mendukung tujuan pembangunan pendidikan.
- 11) Memastikan akses universal ke pendidikan untuk semua lapisan masyarakat; Mengatasi hambatan-hambatan yang mencegah partisipasi, terutama untuk kelompok rentan dan daerah terpencil; Menjamin kesetaraan pendidikan bagi semua siswa, tanpa memandang jenis kelamin, suku bangsa, agama, atau kondisi sosial-ekonomi.
- 12) Memperkuat program PAUD untuk memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan anak sejak dini;
- 13) Menyediakan akses PAUD yang merata di seluruh wilayah.
- 14) Menjamin pendidikan gratis dan wajib setidaknya hingga tingkat pendidikan dasar atau menengah pertama; Memberikan insentif atau bantuan finansial kepada keluarga untuk mendukung partisipasi anak-anak di sekolah.
- 15) Membangun dan memperbarui infrastruktur pendidikan, termasuk gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya; Menjamin sekolah mudah diakses oleh masyarakat dengan menyediakan transportasi yang memadai.
- 16) Memberikan pelatihan dan pengembangan terus-menerus kepada guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran; Meningkatkan seleksi, pelatihan, dan pengakuan guru dengan standar yang tinggi.
- 17) Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran; Memastikan akses dan pelatihan TIK bagi guru dan siswa.
- 18) Mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sekolah dan pengambilan keputusan; Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anak, termasuk melalui pertemuan orang tua dan program keterlibatan komunitas.
- 19) Menerapkan sistem penilaian yang adil dan objektif untuk mengukur kemajuan siswa; Membangun sistem pemantauan kualitas yang efektif untuk mengawasi kinerja sekolah dan guru serta mengidentifikasi area perbaikan.
- 20) Menyusun program bantuan keuangan dan beasiswa untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu; Memberikan insentif bagi siswa berprestasi untuk memotivasi pencapaian akademis yang lebih tinggi.
- 21) Mengadopsi kebijakan pendidikan inklusif untuk memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan akses pendidikan yang setara; Memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar.
- 22) Membangun pendidikan karakter yang melibatkan pembentukan nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab sosial; Memasukkan pembelajaran etika dan moral dalam kurikulum.
- 23) Mendorong akses dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi untuk memberikan peluang lebih besar bagi siswa untuk mengejar pendidikan lanjutan; Menyediakan program beasiswa dan bantuan keuangan untuk pendidikan tinggi.
- 24) Menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk guru dan tenaga pendidik; Mendorong partisipasi dalam program pengembangan profesional dan kursus lanjutan.

1.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

- 1) Percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
- 2) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intra region & inter region.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
- 4) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya.
- 5) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
- 6) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha dan Memberikan dukungan khusus kepada sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk menciptakan pekerjaan.
- 7) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan Mengembangkan program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing pekerja di pasar kerja.
- 8) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan fokus pada pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta mengembangkan program asuransi kesehatan yang terjangkau bagi keluarga miskin.
- 9) Investasi dalam pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat dan Memastikan distribusi infrastruktur merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
- 10) Memberdayakan petani dengan memberikan dukungan teknologi, permodalan, dan akses pasar yang lebih baik dan Mengembangkan program untuk diversifikasi ekonomi di daerah pedesaan dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
- 11) Menerapkan program perlindungan sosial yang menasar kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan keluarga miskin dan Memastikan bahwa program perlindungan sosial dirancang untuk memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan.
- 12) Mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung hak pekerja, termasuk upah yang layak dan kondisi kerja yang aman dan Meningkatkan akses pekerja informal ke keamanan sosial dan perlindungan kesejahteraan.
- 13) Memastikan kesetaraan gender dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi dan Mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan memberikan dukungan khusus untuk kewirausahaan perempuan.
- 14) Menyusun kebijakan perpajakan yang adil dan progresif untuk mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata dan Menangani praktik-praktik penghindaran pajak dan korupsi yang dapat merugikan fiskal dan pembangunan ekonomi.
- 15) Meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok miskin, dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan Membangun mekanisme yang memungkinkan umpan balik dan keterlibatan publik yang efektif.
- 16) Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program penanggulangan kemiskinan dan Memperkuat tata kelola dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya pembangunan.
- 17) Mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan Memberikan insentif dan dukungan kepada sektor swasta untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja.
- 18) Mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memberikan keterlibatan langsung dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan dan Mendukung inisiatif-inisiatif lokal untuk mengatasi masalah kemiskinan.
- 19) Mendorong inovasi dan penerapan teknologi dalam sektor-sektor ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan Memastikan bahwa teknologi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- 20) Mengintegrasikan strategi pengelolaan risiko dan adaptasi perubahan iklim dalam program pembangunan serta Memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana alam dan perubahan iklim.

2.1. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

- 1) Pengembangan produk unggulan pertanian, kelautan, dan Jasa Pariwisata
- 2) Peningkatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk
- 3) Pengembangan produk unggulan pertanian, kelautan, dan Jasa Pariwisata
- 4) Peningkatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk
- 5) Menyusun rencana strategis pariwisata yang jelas dengan mempertimbangkan keberlanjutan, keberagaman, dan keberdayaan masyarakat dan Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk warga setempat, dalam proses perencanaan.
- 6) Memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur wisata, termasuk jalan, transportasi umum, bandara, dan area parkir dan Menyediakan fasilitas umum yang memadai, seperti toilet umum, tempat istirahat, dan tanda petunjuk wisata.
- 7) Menerapkan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan untuk menjaga keaslian dan keindahan kota serta Mengatur kapasitas kunjungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kenyamanan wisatawan.
- 8) Mengembangkan kampanye promosi yang efektif untuk meningkatkan visibilitas kota sebagai destinasi pariwisata dan Membangun kehadiran online melalui situs web, media sosial, dan aplikasi pariwisata.
- 9) Melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata dan Mendorong partisipasi warga setempat dalam peluang bisnis pariwisata, seperti homestay, kuliner lokal, dan kerajinan tangan.
- 10) Memberikan pelatihan kepada tenaga kerja terkait pariwisata untuk meningkatkan pelayanan dan keramahan dan Mengembangkan keterampilan kewirausahaan di kalangan masyarakat lokal untuk mendukung bisnis pariwisata.
- 11) Melindungi warisan budaya dan alam kota dengan merancang kebijakan konservasi yang kuat serta Menyusun pedoman untuk pelestarian dan restorasi bangunan bersejarah serta pengelolaan taman dan daerah lindung.
- 12) Melindungi warisan budaya dan alam kota dengan merancang kebijakan konservasi yang kuat dan Menyusun pedoman untuk pelestarian dan restorasi bangunan bersejarah serta pengelolaan taman dan daerah lindung.
- 13) Membangun kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung pengembangan pariwisata serta Menyusun forum dialog dan koordinasi untuk memfasilitasi kolaborasi lintas-sektoral.
- 14) Memastikan keamanan wisatawan dan memitigasi risiko potensial terkait keamanan dan Menyelenggarakan program kebersihan dan pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan destinasi pariwisata.
- 15) Menyediakan informasi wisata yang lengkap dan akurat melalui papan informasi, pusat informasi wisata, dan aplikasi khusus serta Mendorong penggunaan teknologi untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih interaktif dan informatif.
- 16) Mengembangkan berbagai produk pariwisata untuk menarik berbagai segmen pasar dan Mendorong pengembangan wisata budaya, kuliner, sejarah, dan alam.
- 17) Menerapkan kebijakan yang meminimalkan dampak negatif sosial dan ekonomi pariwisata, seperti gentrifikasi atau peningkatan biaya hidup serta Menyusun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi perusahaan pariwisata.
- 18) Meningkatkan aksesibilitas ke destinasi pariwisata melalui transportasi publik, jalur pejalan kaki, dan sepeda dan Mengoptimalkan konektivitas antar-destinasi untuk meningkatkan pengalaman perjalanan.
- 19) Mendukung penyelenggaraan acara-acara pariwisata, festival, dan kegiatan budaya lainnya dan Membangun kalender acara yang menarik untuk menarik kunjungan wisatawan sepanjang tahun.
- 20) Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sektor pariwisata dan keberlanjutan ekonomi lokal dan Menggunakan data untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata.
- 21) Mendorong pembentukan dan pengembangan kluster ekonomi kreatif yang melibatkan pelaku industri kreatif dan Menyediakan insentif untuk memfasilitasi kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, lembaga pendidikan, dan pemerintah.
- 22) Meningkatkan dukungan untuk pelatihan kewirausahaan dan pendampingan bagi calon pengusaha dan Menyediakan fasilitas pendanaan yang mudah diakses bagi wirausaha baru.
- 23) Menyediakan pelatihan dan bimbingan untuk pemilik UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional dan Memberikan akses kepada UMKM untuk teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing.
- 24) Mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi untuk meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan anggota serta Menyediakan dukungan dalam hal modal, pelatihan, dan akses ke pasar bagi koperasi.

2.1. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

- 25) Mengoptimalkan peran BUMD dalam pengembangan proyek-proyek strategis dan sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan Menyusun kebijakan yang memastikan transparansi dan akuntabilitas manajemen BUMD.
- 26) Menyediakan pelatihan, akses ke modal, dan informasi pasar bagi usaha kecil dan menengah di sektor non-pertanian dan Mendorong kolaborasi antara UMKM dengan perusahaan besar untuk memperluas jaringan dan pasar.
- 27) Meningkatkan akses perusahaan ke pembiayaan dan modal kerja serta Menyediakan insentif pajak dan dukungan teknis bagi industri kecil dan menengah.
- 28) Merancang program penelitian dan pengembangan untuk mendukung inovasi di sektor ekonomi kreatif dan UMKM dan Mendorong adopsi teknologi di semua tingkatan industri untuk meningkatkan produktivitas.
- 29) Menyediakan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan industri kecil dan menengah dan Membangun keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja dan perkembangan teknologi.
- 30) Menetapkan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan UMKM dan sektor ekonomi kreatif dan Memberikan insentif pajak untuk investasi di industri kecil dan menengah.
- 31) Membangun kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM dan Menyusun program kemitraan publik-swasta yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing.
- 32) Meningkatkan akses UMKM dan pelaku ekonomi kreatif ke layanan keuangan seperti kredit, investasi, dan ekuitas dan Mendorong perkembangan lembaga keuangan yang mendukung sektor-sektor ini.
- 33) Memasukkan aspek inklusivitas dalam kebijakan untuk memastikan pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal dalam sektor ekonomi kreatif dan UMKM serta Mendorong partisipasi yang lebih aktif dari kelompok yang rentan.
- 34) Mendorong inovasi dan pengembangan produk yang dapat bersaing di pasar global dan Menyusun strategi ekspor dan membangun jejaring untuk memasarkan produk lokal ke pasar internasional.
- 35) Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diimplementasikan dan Menggunakan data dan indikator kinerja untuk mengukur dampak kebijakan dan membuat perubahan yang diperlukan.
- 36) Membangun program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan Menyediakan akses yang lebih baik ke pendidikan tinggi dan pelatihan vokasional.
- 37) Mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja, Memberikan insentif kepada perusahaan untuk memperluas operasi dan merekrut lebih banyak tenaga kerja.

- 38) perusahaan untuk memperluas operasi dan merekrut lebih banyak tenaga kerja.
- 39) Mengadopsi kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan di tempat kerja, Menyediakan fasilitas dan dukungan untuk perempuan yang bekerja, seperti fasilitas child care.
- 40) Menyusun kebijakan yang mendorong inklusivitas di pasar kerja, termasuk kelompok minoritas dan difabel dan Memastikan adanya keadilan dalam proses rekrutmen dan penggajian.
- 41) Menyediakan akses yang lebih mudah ke pembiayaan bagi UMKM dan Memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada UMKM untuk meningkatkan peluang kesuksesan mereka.
- 42) Mendorong pengembangan industri dan sektor inovatif untuk menciptakan peluang pekerjaan yang lebih berorientasi masa depan dan Memberikan insentif untuk riset dan pengembangan di sektor-sektor kunci.
- 43) Mendorong pembentukan koperasi dan usaha mandiri di tingkat komunitas dan Menyediakan dukungan keuangan dan pelatihan untuk memperkuat koperasi dan usaha mandiri.
- 44) Mendorong perempuan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, Menyusun program pendidikan khusus untuk perempuan.
- 45) Membangun ekosistem kewirausahaan yang mendukung pertumbuhan startup dan usaha baru dan Menyediakan dukungan keuangan dan mentorship untuk pebisnis muda.
- 46) Memperkenalkan kebijakan fleksibilitas kerja, seperti bekerja dari rumah atau jam kerja yang fleksibel dan Mendorong perusahaan untuk mengadopsi model kerja yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja.
- 47) Meningkatkan akses infrastruktur dasar seperti transportasi dan teknologi informasi dan Memperkenalkan program untuk memastikan inklusivitas digital bagi semua lapisan masyarakat.
- 48) Menyusun program magang dan pelatihan untuk memberikan pengalaman kerja kepada pemuda dan Mengintegrasikan program magang dengan kebutuhan industri lokal.
- 49) Membangun kemitraan erat antara lembaga pendidikan dan industri untuk memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan Menyusun program penerimaan kerja langsung dari lembaga pendidikan.
- 50) Melakukan evaluasi rutin terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dan Menyesuaikan kebijakan dan intervensi berdasarkan hasil evaluasi untuk memaksimalkan dampak positif.
- 51) Mendorong lembaga riset dan inovasi untuk berkolaborasi dengan industri lokal dan Mengadopsi kebijakan yang mendukung pengembangan inovasi di berbagai sektor.
- 52) Menyusun rencana strategis pariwisata yang jelas dengan mempertimbangkan keberlanjutan, keberagaman, dan pemberdayaan masyarakat dan Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk warga setempat, dalam proses perencanaan.



2.2. Penerapan Ekonomi Hijau

- 1) Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis.
- 2) Mendorong praktik pertanian organik dan berkelanjutan yang mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dan Memberikan insentif kepada petani yang menerapkan teknik pertanian ramah lingkungan.
- 3) Mendukung pengembangan sistem pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan Memberdayakan petani lokal dan kelompok petani kecil untuk memasok ke pasar lokal.
- 4) Mendorong diversifikasi tanaman untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan Memperkenalkan dan mendukung produksi sumber pangan alternatif seperti tanaman konservasi dan tanaman pangan alternatif.
- 5) Meminimalkan pemborosan dan kerugian pangan melalui sistem manajemen rantai pasok yang efisien, Mendorong praktik pengolahan pangan yang mengurangi limbah.
- 6) Meningkatkan infrastruktur pertanian yang ramah lingkungan, seperti irigasi efisien dan sistem energi terbarukan dan Mendukung transportasi dan distribusi pangan berbasis energi terbarukan.
- 7) Mendorong penggunaan teknologi pertanian yang inovatif dan ramah lingkungan, seperti penggunaan sensor untuk manajemen air dan tanah, Memberikan dukungan bagi penelitian dan pengembangan teknologi pertanian hijau.
- 8) Mengimplementasikan kebijakan perlindungan lingkungan yang ketat untuk mengurangi dampak negatif pertanian terhadap ekosistem, Menyusun peraturan yang mendorong pemulihan dan pelestarian ekosistem alami.
- 9) Memberdayakan petani dan komunitas lokal untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan terkait pertanian, Mendukung pembentukan kelompok pertanian berkelanjutan dan koperasi.
- 10) Melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya penerapan ekonomi hijau dalam ketahanan pangan dan Mengedukasi masyarakat tentang pola makan yang berkelanjutan dan pilihan konsumsi yang ramah lingkungan.
- 11) Menjamin inklusi sosial dan keadilan dalam pengembangan ekonomi hijau, termasuk hak-hak petani kecil dan komunitas adat dan Mendorong partisipasi perempuan dalam kebijakan dan praktik pertanian berkelanjutan.

2.3. Penerapan Ekonomi Hijau

- 1) Peningkatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 2) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/ teknologi terapan
- 3) Meningkatkan investasi dalam infrastruktur telekomunikasi dan teknologi yang mendukung koneksi internet yang cepat dan handal dan Memastikan akses internet yang merata di seluruh wilayah untuk mengurangi kesenjangan digital.
- 4) Mengembangkan program literasi digital untuk masyarakat agar dapat menggunakan teknologi dengan efektif.
- 5) Menetapkan kebijakan yang kuat terkait perlindungan privasi data dan keamanan siber, Mendorong praktik-praktik keamanan data yang tinggi di sektor bisnis dan pemerintah.
- 6) Mendukung pembentukan dan pertumbuhan startup teknologi melalui insentif dan fasilitas, Mendorong kemitraan antara sektor publik, swasta, dan lembaga riset untuk mendukung inovasi.
- 7) Memberikan insentif fiskal dan pembiayaan khusus untuk industri teknologi, Menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pertumbuhan perusahaan teknologi.
- 8) Mendorong pendidikan dan pelatihan dalam bidang digital dan teknologi, Menyusun program sertifikasi dan pengakuan untuk keahlian digital.
- 9) Membangun kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akademis untuk pengembangan teknologi dan inovasi, Membuat kebijakan yang mendukung keterlibatan sektor swasta dalam proyek-proyek digital.
- 10) Meninjau dan mengoptimalkan regulasi yang mungkin menjadi hambatan untuk inovasi, Mengembangkan kerangka regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi.
- 11) Memastikan aksesibilitas teknologi bagi semua lapisan masyarakat, Mengurangi kesenjangan digital melalui program-program inklusif.
- 12) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan Mengembangkan aplikasi dan solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan.



2.4. Integrasi Ekonomi Domestik & GLocal

- 1) Pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri lokal
- 2) Pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global.
- 3) Pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah.
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur terkait perdagangan jalan raya, dan terminal dan Menyusun kebijakan untuk mempermudah arus barang dan jasa secara efisien.
- 5) Memberikan insentif bagi industri-industri yang berpotensi untuk ekspansi ke pasar internasional dan Mendorong diversifikasi produk ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau pasaran tertentu.
- 6) Menyusun kebijakan tarif dan non-tarif yang mendukung integrasi ekonomi internasional dan Membuat regulasi yang transparan dan dapat diakses untuk memastikan perusahaan dapat memahami dan mematuhi persyaratan perdagangan.
- 7) Mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi domestik dan Menyusun kebijakan yang mendukung inovasi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi di berbagai sektor.
- 8) Membangun kemitraan strategis dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dan Mendorong investasi asing dengan memberikan insentif dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

2.5. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

- 1) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
- 2) Pembangunan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage.
- 3) Pemenuhan Kebutuhan pangan secara sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal.
- 4) Meningkatkan investasi dalam infrastruktur kota, termasuk transportasi, energi, air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi dan Mengembangkan proyek infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung mobilitas dan konektivitas perkotaan.
- 5) Membangun pusat bisnis dan keuangan yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, Menyediakan fasilitas dan insentif untuk menarik perusahaan dan lembaga keuangan untuk berlokasi di kawasan tersebut.
- 6) Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan Menyusun kebijakan untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 7) Membuat kebijakan untuk memfasilitasi pendirian dan pertumbuhan usaha, terutama bagi sektor-sektor inovatif dan berorientasi ekspor dan Menyederhanakan proses perizinan dan regulasi untuk meningkatkan iklim bisnis.
- 8) Mengembangkan kebijakan perumahan yang terjangkau untuk mendukung keberlanjutan dan inklusivitas perkotaan dan Mendorong pengembangan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan transportasi.
- 9) Menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengatasi dampak perkembangan perkotaan dan Menerapkan program inklusif untuk menangani masalah ketidaksetaraan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan perkotaan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

**3.1. Regulasi & Tata Kelola yg Berintegritas & Adaptif**

- 1) Meningkatkan tata kelola dengan memastikan keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan Menerapkan praktik-praktik tata kelola yang baik, termasuk penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi.
- 2) Memperkuat lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan Memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup untuk memastikan keberhasilan fungsi pengawasan.
- 3) Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pejabat publik, regulator, dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan tata kelola.
- 4) Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan implementasi kebijakan dan Membangun kemitraan strategis untuk mendukung pembangunan jangka panjang.
- 5) Mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi dan Memanfaatkan data dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
- 6) Memasukkan prinsip-prinsip inklusi dan keadilan sosial dalam regulasi untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan jangka panjang dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.
- 7) Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan regulasi dan dampaknya terhadap pembangunan jangka panjang dan Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk pembelajaran dan perbaikan terus-menerus.

Misi 4

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Penguatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah



4.1. Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibum Linmas Daerah

- Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas

4.2. Stabilitas Ekonomi Makro

- 1) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan Memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
- 2) Pembangunan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage.
- 3) Pemenuhan Kebutuhan pangan secara sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam danb kearifan lokal.
- 4) Menerapkan kebijakan moneter yang mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dan Menjaga suku bunga dan kebijakan moneter lainnya agar sesuai dengan kondisi ekonomi saat itu.
- 5) Menyusun kebijakan fiskal yang seimbang, dengan menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dan Memanfaatkan kebijakan anggaran untuk merespons kondisi ekonomi, seperti kebijakan stimulus saat resesi atau penghematan saat ekonomi membaik.
- 6) Meningkatkan kapasitas dan ketahanan sektor keuangan untuk mengurangi risiko sistemik dan Memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap lembaga keuangan dan mempromosikan transparansi.
- 7) Memantau dan mengendalikan tingkat inflasi untuk mencegah ketidakstabilan harga dan Menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengelola inflasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 8) Melakukan investasi strategis dalam infrastruktur ekonomi untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan Memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur direncanakan dan diimplementasikan dengan efisien.

- 9) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dan Memastikan adanya keseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan pasar.
- 10) Diversifikasi struktur ekonomi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada sektor tertentu dan Mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru dan inovasi dalam perekonomian.
- 11) Mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan Memfasilitasi iklim bisnis yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan sektor swasta.

4.3. Daya Saing Daerah

- 1) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
- 2) Pembangunan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
- 3) Pengembangan dan Diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi



5.1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

- 1) Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila
- 2) Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
- 3) Memperkuat pengajaran nilai-nilai beragama di semua tingkat pendidikan.
- 4) Mengintegrasikan aspek moral dan etika ke dalam kurikulum untuk membentuk karakter yang kuat dan berakhlak.
- 5) Mendukung peran lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan moral dan sosial.
- 6) Mendorong keterlibatan lembaga keagamaan dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat.
- 7) Menetapkan kebijakan inklusif yang memastikan perlindungan hak semua warga, tanpa memandang agama, ras, atau latar belakang lainnya.
- 8) Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui program-program redistribusi yang adil.
- 9) Melindungi dan memelihara warisan budaya lokal dan tradisi.
- 10) Mendorong pengembangan seni dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas Kota Metro
- 11) Menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada maslahat umum.
- 12) Memastikan distribusi yang adil dari kekayaan dan manfaat ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 13) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- 14) Membangun forum dialog dan konsultasi publik untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- 15) Meningkatkan akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk semua lapisan masyarakat.
- 16) Menjamin keberlanjutan dan kesetaraan dalam pelayanan publik.
- 17) Mendorong etika bisnis yang bertanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai beragama.
- 18) Menetapkan standar etika dalam praktik-praktik bisnis untuk menghindari eksploitasi dan ketidaksetaraan.
- 19) Mendorong dialog dan pemahaman antar agama untuk memperkuat harmoni sosial.
- 20) Menyelenggarakan acara dan kegiatan yang mempromosikan kerjasama antarbudaya dan toleransi.
- 21) Menyusun program dukungan untuk keluarga yang mempromosikan nilai-nilai positif dan fungsi keluarga sebagai agen sosialisasi utama.
- 22) Mendorong peran aktif orangtua dalam mendidik anak-anak mereka.
- 23) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor.
- 24) Menetapkan kebijakan yang mendukung peran perempuan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat.
- 25) Meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan maslahat.
- 26) Menyusun peraturan yang mendukung kehidupan beragama dan bertoleransi.



5.2. **Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**

- 1) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
- 2) Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan formal dan keterampilan.
- 3) Memberdayakan perempuan melalui program pelatihan dan dukungan pengembangan usaha mandiri.
- 4) Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual.
- 5) Menyediakan dukungan kesejahteraan keluarga termasuk akses ke layanan kesehatan maternal dan anak.
- 6) Mendukung akses perempuan terhadap peluang ekonomi yang setara dengan laki-laki.
- 7) Mendorong kebijakan yang mendukung kewirausahaan perempuan dan pemberdayaan ekonomi perempuan di berbagai sektor.
- 8) Menetapkan kebijakan pengarusutamaan gender dalam kurikulum pendidikan dan program pelatihan.
- 9) Memastikan keberlanjutan upaya untuk mengatasi kesenjangan gender di tingkat pendidikan dan pekerjaan.
- 10) Menetapkan kebijakan cuti parental yang mendukung peran aktif ayah dan ibu dalam pengasuhan anak.
- 11) Mendorong fleksibilitas kerja untuk mendukung keseimbangan antara kehidupan keluarga dan profesional.
- 12) Memperkuat sistem perlindungan dan penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 13) Mengedepankan pendidikan masyarakat dan dukungan psikososial bagi korban kekerasan.
- 14) Menyusun program kesejahteraan anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap kegiatan positif.
- 15) Mendorong partisipasi pemuda dalam pengambilan keputusan dan program pembangunan.
- 16) Mengintegrasikan nilai-nilai positif dan pendidikan karakter dalam program-program keluarga.
- 17) Mendorong peran keluarga sebagai agen pembentukan karakter anak.
- 18) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.
- 19) Menyusun program partisipatif yang melibatkan keluarga dan masyarakat.
- 20) Membangun sistem perlindungan sosial yang merata dan inklusif.
- 21) Memastikan akses semua keluarga, terutama yang rentan, terhadap jaringan perlindungan sosial.
- 22) Mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- 23) Mengeliminasi hambatan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik dan kepemimpinan.
- 24) Menetapkan kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- 25) Memberikan dukungan dan peluang inklusif untuk penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
- 26) Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat.
- 27) Melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan.
- 28) Mendorong pariwisata berkelanjutan yang menghormati budaya lokal.
- 29) Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan lingkungan dalam industri pariwisata.
- 30) Menerapkan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik, termasuk kebijakan perdamaian yang melibatkan keluarga dan masyarakat.
- 31) Mendorong dialog antarbudaya untuk mempromosikan pemahaman dan rekonsiliasi.
- 32) Meningkatkan akses dan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
- 33) Memastikan layanan publik merata dan mengakomodasi keberagaman masyarakat.



5.3. Lingkungan Hidup yang Berkualitas

- 1) Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Daerah
- 2) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun periode 2025-2030 (untuk 5 tahun sekali) dan diintegrasikan dalam RPJMD.
- 3) Pemantauan dan Pengawasan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keanekaragaman hayati untuk pemutakhiran Profil Kehati.
- 4) Pembangunan dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kota Metro
- 5) Pengembangan Sistem Informasi Taman Kehati.
- 6) Mendorong investasi dalam pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan biomassa.
- 7) Menyusun kebijakan fiskal dan insentif untuk mendukung produksi dan penggunaan energi terbarukan.
- 8) Menetapkan standar efisiensi energi untuk industri, transportasi, dan sektor rumah tangga.
- 9) Memberikan insentif untuk penggunaan teknologi ramah lingkungan dan investasi dalam inovasi energi bersih.
- 10) Menyusun kebijakan pengelolaan air yang berkelanjutan, termasuk langkah-langkah untuk mengatasi kerusakan ekosistem air.
- 11) Mendorong teknologi pengelolaan air yang efisien dan konservatif.
- 12) Melakukan inventarisasi dan pemetaan sumber daya alam serta keanekaragaman hayati.
- 13) Menetapkan kawasan konservasi dan menjalankan program restorasi ekosistem yang terdegradasi.
- 14) Mendorong praktik pertanian berkelanjutan dengan penggunaan pupuk organik, pengelolaan air yang efisien, dan rotasi tanaman.
- 15) Memberikan dukungan kepada petani untuk menerapkan teknologi modern yang berkelanjutan.
- 16) Mendorong diversifikasi produksi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman atau sumber pangan.
- 17) Mengembangkan program keamanan pangan yang melibatkan produksi lokal dan ketahanan pangan di tingkat lokal.
- 18) Menetapkan kebijakan untuk pengelolaan limbah yang efektif dan peningkatan daur ulang.
- 19) Mengurangi penggunaan plastik dengan melibatkan industri dan masyarakat dalam kampanye pengurangan plastik.
- 20) Memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
- 21) Mendorong pemulihan dan penghukuman terhadap pencemaran lingkungan.
- 22) Menerapkan program penanaman pohon massal dan restorasi hutan untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan keseimbangan ekosistem.
- 23) Memberikan insentif bagi masyarakat dan bisnis yang berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan.
- 24) Mendorong pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, termasuk transportasi umum, jaringan jalan bersepeda, dan teknologi hijau.
- 25) Menyusun kebijakan penataan tata ruang yang mendukung pengembangan perkotaan yang berkelanjutan.
- 26) Memasukkan pendidikan lingkungan dalam kurikulum pendidikan formal.
- 27) Melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan peran mereka dalam pelestariannya.
- 28) Mendorong penelitian dan pengembangan teknologi hijau yang mendukung ketahanan energi, air, dan pangan.
- 29) Memberikan insentif bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi bersih.
- 30) Berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk mengatasi masalah lingkungan global.

5.3. Lingkungan Hidup yang Berkualitas

- 1) Menjalin kemitraan regional dan internasional untuk bertukar pengetahuan dan sumber daya.
- 2) Menetapkan indikator dan standar kinerja lingkungan untuk mengukur kemajuan dan dampak kebijakan.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan lingkungan.
- 4) Pengimplementasian Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Metro untuk mampu Menjaga serta meningkatkan ketersediaan RTH di Kota Metro.
- 5) Mendorong pemilik lahan, termasuk lahan pemerintah, untuk melakukan pemanfaatan terhadap lahan tidak produktif, termasuk tanah terlantar atau lahan terbuka yang tidak dimanfaatkan secara efisien, untuk dikonversi menjadi RTH.
- 6) Memasukkan penyediaan RTH sebagai bagian integral dari rencana tata ruang kota. Hal ini harus menjadi prioritas dalam proses perencanaan perkotaan.
- 7) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH dan menjaga lingkungan hijau melalui program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah dan sosialisasi.
- 8) Mendorong diversifikasi RTH dengan mengembangkan taman tematik, seperti taman edukasi alam, taman budaya, dan taman rekreasi khusus, untuk memenuhi kebutuhan beragam masyarakat.
- 9) Menetapkan standar perawatan dan pengelolaan RTH yang lebih tinggi, termasuk penerapan metode ekologis dan praktik berkelanjutan untuk meningkatkan keberlanjutan dan biodiversitas di dalam RTH.
- 10) Melakukan pemetaan wilayah yang potensial untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 11) Mendorong pembangunan taman kota yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
- 12) Melakukan program penanaman pohon massal di ruang terbuka yang ada.
- 13) Mendorong pemilik lahan privat untuk menanam pohon di pekarangan dan area komersial mereka.
- 14) Memperkenalkan konsep desain kota yang berkelanjutan, memprioritaskan pejalan kaki dan sepeda, dan mengintegrasikan RTH dalam struktur kota.
- 15) Mengadopsi prinsip-prinsip konsep Eco-City untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

- 16) Membangun kebijakan dan kerangka kerja untuk mendukung transisi menuju ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah.
- 17) Mendorong kolaborasi dengan industri dan bisnis lokal untuk mempromosikan penggunaan kembali dan daur ulang bahan.
- 18) Menerapkan konsep 9R (Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Repurpose, Refurbish, Remanufacture, Recover, Recycle) dalam strategi pengelolaan sampah.
- 19) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti program kebersihan lingkungan dan bank sampah
- 20) Meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas TPS3R hingga mencakup tingkat kelurahan.
- 21) Mengintegrasikan teknologi informasi untuk pemantauan dan manajemen efektif TPS3R.
- 22) Mengidentifikasi dan mengimplementasikan proyek-proyek pengembangan Refuse-Derived Fuel (RDF untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber energi alternatif.
- 23) Membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk investasi dalam teknologi RDF.
- 24) Melakukan proyek penambangan landfill sebagai upaya eksplorasi potensi pemulihan bahan berharga dari area pembuangan sampah lama.
- 25) Menyusun regulasi dan pedoman yang mendukung praktik landfill mining yang berkelanjutan.
- 26) Menerapkan tarif sampah yang berbeda berdasarkan volume dan jenis sampah, memberikan insentif untuk pemisahan sampah di tingkat rumah tangga.
- 27) Meningkatkan pengawasan dan penegakan terhadap ketentuan tarif.
- 28) Menerapkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk pemantauan kualitas lingkungan secara digital dan real-time sampai ke titik pencemar.
- 29) Peningkatan efisiensi pengumpulan dan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan komunitas untuk memastikan bahan yang dapat didaur ulang tidak bercampur dengan sampah Organik.



5.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

- 1) Peningkatan konsumsi listrik per Kapita
- 2) Peningkatan intensitas energi/primer
- 3) Penurunan ketidakcukupan konsumsi pangan
- 4) Peningkatan kapasitas air baku
- 5) Peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.
- 6) Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas listrik secara luas bagi seluruh penduduk.
- 7) Mengembangkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kapasitas listrik.
- 8) Mengidentifikasi lokasi potensial untuk instalasi panel surya, turbin angin, dan sumber energi terbarukan lainnya.
- 9) Memastikan instalasi energi terbarukan di wilayah yang strategis dan berorientasi pada efisiensi.
- 10) Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk inovasi dalam teknologi energi terbarukan.
- 11) Membangun skenario perencanaan untuk menggantikan sumber energi konvensional dengan energi terbarukan sesuai dengan Target Nasional dalam RPJPN 2025-2045.
- 12) Mendorong pertanian berkelanjutan dan produktif melalui inovasi teknologi dan praktik pertanian yang efisien.
- 13) Mendukung petani dengan penyediaan input pertanian yang berkualitas dan terjangkau.
- 14) Promosi diversifikasi pertanian untuk meningkatkan keberagaman pangan.
- 15) Mengembangkan infrastruktur distribusi pangan yang efisien untuk memastikan pasokan pangan dapat mencapai semua wilayah.
- 16) Mendorong kebijakan perdagangan yang adil dan mendukung petani lokal.
- 17) Memperkuat sistem distribusi pangan yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
- 18) Mendorong pengembangan sistem ketahanan pangan, seperti penyimpanan dan distribusi pangan yang aman.
- 19) Mengimplementasikan program-program sosial untuk memberikan jaring pengaman bagi kelompok rentan.
- 20) Memperkuat peran perempuan dalam ketahanan pangan.
- 21) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi dan pola makan sehat.
- 22) Mendorong perilaku masyarakat yang mendukung ketahanan pangan, seperti pengelolaan pangan yang efisien.
- 23) Mendorong penelitian dan inovasi dalam produksi pangan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- 24) Pengembangan varietas tanaman dan peternakan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan penyakit.
- 25) Menerapkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, termasuk praktik pertanian yang ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- 26) Terlibat dalam kerjasama internasional untuk pertukaran pengetahuan, teknologi, dan dukungan finansial.
- 27) Mengatasi masalah ketidaksetaraan global dalam akses terhadap sumber daya dan teknologi pertanian.
- 28) Meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan air baku untuk memenuhi kebutuhan meningkatnya populasi dan industri.
- 29) Mengintegrasikan inovasi sumber daya air terbarukan, seperti pemanfaatan air hujan, untuk meningkatkan ketersediaan air.
- 30) Menerapkan teknologi dan praktik terbaik untuk mengoptimalkan penggunaan air di sektor industri demi efisiensi sumber daya.
- 31) Mengadopsi sistem pemantauan dan prediksi ketersediaan air berbasis teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu.
- 32) Melakukan peningkatan dalam pemurnian air baku untuk memastikan kualitas air yang memenuhi standar kesehatan.



5.5. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

- 1) Penguatan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam.
- 2) Mendorong penilaian risiko bencana secara komprehensif untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana.
- 3) Menyusun rencana darurat dan perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan risiko bencana.
- 4) Memasukkan aspek tahan bencana dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, termasuk gedung, jembatan, dan jalur evakuasi.
- 5) Mengadopsi teknologi dan desain yang mampu mengurangi risiko dan kerusakan akibat bencana.
- 6) Mengembangkan dan meningkatkan sistem peringatan dini untuk memberi waktu lebih kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
- 7) Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk memastikan penyebaran informasi yang cepat dan akurat.
- 8) Menerapkan kebijakan pengelolaan tanah dan tata ruang yang meminimalkan risiko bencana, termasuk pembatasan pembangunan di area rawan bencana.
- 9) Mendorong relokasi aman untuk komunitas yang tinggal di daerah yang sangat rentan.
- 10) Menerapkan kebijakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk memitigasi dampak perubahan iklim.
- 11) Melibatkan masyarakat dalam program pelestarian lingkungan yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana.
- 12) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal penanganan bencana, termasuk pelatihan evakuasi, pertolongan pertama, dan pengelolaan bencana.
- 13) Memperkuat peran kelompok masyarakat, seperti kelompok sukarelawan dan lembaga lokal, dalam reaksi dan pemulihan pasca-bencana.
- 14) Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para profesional terkait manajemen risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- 15) Memastikan adanya pengetahuan teknis dan keterampilan yang memadai di tingkat lokal dan nasional.
- 16) Mendorong pengembangan skema asuransi yang terjangkau dan inklusif untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana.
- 17) Mengembangkan model keuangan inklusif untuk membantu masyarakat dalam memitigasi kerugian ekonomi pasca-bencana.
- 18) Mengadopsi teknologi inovatif, seperti sistem pemetaan dan pemantauan berbasis satelit, untuk mendukung pemahaman dan mitigasi risiko bencana.
- 19) Mengembangkan solusi teknologi informasi untuk penyebaran informasi dan koordinasi tanggap darurat.
- 20) Melibatkan diri dalam perjanjian internasional yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca.
- 21) Mengembangkan kebijakan adaptasi perubahan iklim untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang sudah terjadi.
- 22) Memastikan partisipasi aktif masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait risiko bencana.
- 23) Mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan dan memastikan bahwa kebijakan dan program mencerminkan hak asasi manusia.
- 24) Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap bencana.
- 25) Berkolaborasi dalam penyediaan sumber daya dan penanganan dampak bencana.
- 26) Menyusun rencana pemulihan pasca-bencana yang berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- 27) Memastikan keterlibatan penuh masyarakat dalam proses pemulihan dan rekonstruksi.
- 28) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan dan program ketahanan bencana.
- 29) Melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan dan meningkatkan kebijakan berdasarkan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya.
- 30) Merencanakan pembuatan Dokumen RPB sebagai acuan penanggulangan Bencana Kota Metro
- 31) Memperkuat infrastruktur kota, termasuk drainase, tanggul, dan bangunan tahan gempa.
- 32) Menyusun rencana tata ruang yang memperhitungkan risiko bencana untuk pembangunan berkelanjutan.
- 33) Melaksanakan program edukasi masyarakat tentang risiko iklim dan tindakan adaptasi yang dapat diambil.
- 34) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penanganan perubahan iklim melalui program edukasi dan pelibatan komunitas.
- 35) Memperkuat pendidikan, peningkatan kesadaran, serta melatih kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim untuk menghasilkan langkah-langkah berkelanjutan dan terarah.
- 36) Pelaksanaan kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga dalam merancang dan melaksanakan strategi penanganan perubahan iklim, mencakup sharing pengetahuan, sumber daya, dan komitmen Bersama
- 37) Pengintegrasian strategi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam dokumen rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan.

**Pemerataan Pembangunan Dan mengurangi Disparitas Wilayah**

- 1) Menyusun rencana tata ruang yang terpadu untuk memastikan infrastruktur jalan kota mendukung pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan.
- 2) Memperhatikan integrasi antara jaringan jalan, transportasi publik, dan zonasi perkotaan.
- 3) Fokus pada pemeliharaan dan perluasan jaringan jalan utama yang strategis.
- 4) Mengidentifikasi dan memprioritaskan ruas jalan yang penting untuk konektivitas intra dan antar kota.
- 5) Mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dengan jaringan jalan kota.
- 6) Menyediakan fasilitas dan kenyamanan untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik.
- 7) Meningkatkan trotoar dan fasilitas pejalan kaki untuk memberikan akses yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki.
- 8) Menyusun kebijakan untuk mendukung jalur pejalan kaki yang ramah lingkungan.
- 9) Menyusun kebijakan pengelolaan parkir yang efisien untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan ruang jalan.
- 10) Mendorong penggunaan transportasi umum dengan memberikan insentif bagi penggunaan alternatif parkir.
- 11) Mengadopsi teknologi canggih untuk pengelolaan lalu lintas yang lebih efisien.
- 12) Menggunakan sistem pengaturan lampu lalu lintas adaptif dan pengawasan lalu lintas berbasis sensor.
- 13) Mendorong penggunaan material konstruksi yang ramah lingkungan dan teknologi pencahayaan hemat energi.
- 14) Menyusun kebijakan untuk merancang jalan dengan penekanan pada hijau kota dan taman-taman pinggir jalan.
- 15) Mengendalikan kepadatan bangunan di sepanjang ruas jalan utama untuk memfasilitasi mobilitas dan visibilitas.
- 16) Menetapkan regulasi zonasi yang mendukung pemanfaatan lahan yang efisien.
- 17) Membangun jalan sepeda dan jalur sepeda yang terpisah untuk meningkatkan keamanan dan mendukung gaya hidup berkelanjutan.
- 18) Memberikan fasilitas parkir sepeda di sepanjang jalan-jalan utama.
- 19) Menerapkan sistem manajemen lalu lintas berbasis data untuk memahami dan mengatasi pola lalu lintas yang kompleks.
- 20) Memanfaatkan analisis data untuk merencanakan peningkatan jalan yang berdasarkan bukti.
- 21) Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait infrastruktur jalan kota.
- 22) Mengadakan sesi konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan memahami kebutuhan masyarakat lokal.
- 23) Mengembangkan koridor ekonomi di sepanjang ruas jalan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 24) Memberikan insentif bagi bisnis dan perusahaan yang berlokasi di koridor strategis.
- 25) Menggelar kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang keselamatan lalu lintas.
- 26) Menyusun program pelatihan untuk pengemudi, pejalan kaki, dan pengguna jalan lainnya.

**Pemerataan Pembangunan Dan mengurangi Disparitas Wilayah**

- 27) Menyusun kebijakan yang meningkatkan keterjangkauan dan aksesibilitas transportasi umum.
- 28) Menetapkan tarif yang bersaing dan menyediakan layanan transportasi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- 29) Memberdayakan pengusaha lokal dalam proyek konstruksi jalan kota.
- 30) Mendorong penggunaan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam penyediaan bahan dan layanan konstruksi.
- 31) Membangun dan memperluas jaringan transportasi umum untuk mencakup area yang lebih luas di dalam kota.
- 32) Menyediakan fasilitas yang ramah lingkungan, termasuk jalur sepeda dan trotoar yang aman.
- 33) Peningkatan frekuensi dan cakupan layanan transportasi umum untuk mencakup daerah yang belum terjangkau secara optimal
- 34) Menyesuaikan jadwal operasional untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.
- 35) Memastikan aksesibilitas transportasi umum bagi kelompok rentan, seperti penyandang difabilitas, lansia, dan anak-anak.
- 36) Menyediakan layanan transportasi khusus untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus.
- 37) Mengkaji rencana induk pengembangan Transportasi Berbasis Transit-Oriented Development (TOD)
- 38) Peningkatan infrastruktur air bersih dan jaringan distribusi di wilayah yang kurang terlayani, termasuk pengadaan sumur bor, instalasi pompa air, dan pipa distribusi.
- 39) Menerapkan program pemantauan dan pemeliharaan sistem air untuk memastikan kualitas air yang memenuhi standar kesehatan.
- 40) Membuat program subsidi atau bantuan keuangan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah agar dapat mengakses layanan air minum yang layak.
- 41) Melakukan sosialisasi penyadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan pengurangan pemborosan.
- 42) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air melalui forum partisipatif, sosialisasi dan program edukasi.
- 43) Meningkatkan jangkauan layanan air minum aman dan berkelanjutan ke daerah-daerah yang masih belum tercover secara memadai.
- 44) Mengadopsi teknologi terbaru dalam distribusi air untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengaliran air.
- 45) Menggunakan teknologi pemantauan kualitas air untuk memastikan air yang disediakan memenuhi standar kesehatan.
- 46) Meningkatkan pengawasan kualitas air secara berkala untuk memastikan bahwa air yang disediakan aman untuk digunakan dan/atau dikonsumsi.
- 47) Menetapkan kebijakan dan regulasi yang memastikan bahwa penyediaan air minum yang aman dan berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam perencanaan perkotaan.
- 48) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber air dan pemeliharaan infrastruktur air minum

Misi 7

Sarana dan Prasarana yang Berkualitas & Ramah Lingkungan

Tahap 1

- 1) Peningkatan pembangunan sarana prasarana dasar dan pengendalian lingkungan.
- 2) Melakukan pemetaan dan identifikasi lahan milik pemerintah yang dapat digunakan sebagai lokasi potensial untuk pembangunan perumahan.
- 3) Memperkuat sistem keuangan untuk mendukung program perumahan dengan menyusun skema pinjaman dan subsidi yang lebih terjangkau.
- 4) Meningkatkan infrastruktur penunjang di sekitar kawasan perumahan, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi.
- 5) Membangun kemitraan strategis dengan pengembang swasta untuk meningkatkan kapasitas pembangunan perumahan.
- 6) Membangun sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan keefektifan program perumahan
- 7) Membangun dan meningkatkan infrastruktur air bersih untuk mengurangi risiko kontaminasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap air yang aman.
- 8) Menetapkan kebijakan ketat untuk mengurangi polusi air, dengan fokus pada pengelolaan limbah industri dan rumah tangga.
- 9) Menerapkan teknologi inovatif dalam sistem pengelolaan air minum dan sanitasi untuk mengurangi dampak lingkungan.
- 10) Mendorong penggunaan septic tank di rumah tangga untuk mengolah limbah domestik secara aman.

Misi 8

Kesinambungan Pembangunan

Tahap 1

- 1) Penyempurnaan instrumen kebijakan dan kelembagaan dalam pengelola sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif
- 2) Inovasi dan penetapan project investasi strategis jangka menengah dan jangka panjang
- 3) Promosi pemerintah daerah kepada publik dan Eksplorasi mitra pendanaan pembangunan
- 4) Percepatan pembangunan sistem Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan penganggaran
- 5) Keselarasan pembangunan pusat- daerah secara konsisten
- 6) Kapasitas fiskal daerah dalam kategori “sedang”

Selesai